BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak biasanya disalurkan untuk pembayaran berbagai macam fasilitas publik. Pajak pada dasarnya dibayar oleh rakyat dan harus disetorkan ke negara. Menurut UU No 16 Tahun 2009, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara oleh pribadi atau badan memiliki sifat memaksa, dan tidak ada timbal balik langsung dimana biaya tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Pada saat masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak yang berdampak bagi Wajib Pajak (WP) dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Permenkeu Nomor 86 Tahun 2020 (PMK 86 Tahun 2020) terkait Insentif Pajak dikeluarkan sebagai salah satu bentuk bantuan pemerintah kepada WP yang terdampak wabah virus Covid-19. Sebelum diterbitkannya peraturan tersebut, roda perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis diakibatkan oleh adanya Covid-19. Covid-19 dikategorikan sebagai bencana non-alam yang sangat berdampak terhadap stabilitas perekonomian serta sumber penerimaan negara.

Insentif pajak diberikan oleh pemerintah untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22 (Impor), Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerima fasilitas Insentif PPh 21 dari bantuan pemerintah ini merupakan karyawan dari perusahaan di beberapa sektor industri terpilih, perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan yang berlokasi di daerah kawasan berikat. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada karyawan pemegang kartu NPWP yang memiliki penghasilan bruto tetap, penghasilan bruto yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun berada tidak lebih tinggi dari 200 juta rupiah. Karyawan tersebut menerima bebas pajak karena pemerintah menanggung kewajiban pajaknya.

Dalam pelaksanaan penanggung jawaban pajak PPh Pasal 21 oleh pemerintah, proses perhitungan harus dilakukan oleh pemotong, khususnya pihak perusahaan, berdasarkan peraturan UU No 36 Tahun 2008. Memberikan perlakuan yang berbeda untuk karyawan yang belum mendapatkan kartu NPWP, serta menerapkan prosedur perhitungan PPh pasal 21 dimana perhitungan pajak akan membuahkan hasil akhir yang sama dengan jumlah yang disetorkan perusahaan ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

Kantor Konsultan Pajak Ronny Irawan (*Jasper Consultant*) merupakan perusahaan yang menawarkan jasa konsultan pajak maupun *accounting* dimana mereka memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang dan memiliki kewajiban dalam memberikan jasa perpajakan maupun *accounting* kepada klien. PT.X merupakan salah satu klien dari kantor pajak Ronny Irawan.

PT.X merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang plastik, khususnya dalam distributor bahan baku biji plastik. Selain melakukan berbagai transaksi terkait pajak terutang PPh Pasal 21 di setiap tahunnya, PT.X pun harus memenuhi kewajiban perpajakan untuk pegawai serta untuk badan. PT.X merupakan perusahaan perdagangan besar karet dan bentuk dasar biji plastik yang berlokasi di Jalan Kapasan No. 196-O Simokerto, Surabaya. PT.X memiliki pegawai tetap sebanyak 6 pegawai sehingga untuk setiap perhitungannya tiap pegawainya berbeda.

Adapun beberapa pertimbangan yang mendorong penulis untuk tertarik memilih judul “Pengaruh Insentif Pemerintah dalam Rangka Covid terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.X” yaitu; tertarik pada penerbitan regulasi pemerintah terkait insentif pajak bagi wabah covid-19. Disisi lain, perusahaan juga harus dapat mengoptimalkan pajak perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil akhir dari perencanaan pajak terhadap laba kotor, beban pajak, dan pengeluaran lainnya selain pajak.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik ini dilaksanakan di salah satu Kantor Konsultan Pajak di Surabaya. Studi ini memiliki ruang lingkup yang mencakup identifikasi objek PPh Pasal 21, perhitungan PPh Pasal 21, dan pelaporan SPT PPh pasal 21 DTP. Kegiatan PKL meliputi analisis PPh Pasal 21 pada PT.X. Seluruh data terkait objek laporan ini diperoleh dari Konsultan Pajak Ronny Irawan dengan PT. X sebagai kliennya.

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan dan penyusunan laporan ini adalah:

- a. Memahami proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP berdasarkan peraturan perpajakan.
- b. Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik di tempat kerja.

1.4 Manfaat

Dalam pelaksanaannya, program PKL memiliki harapan agar bermanfaat bagi seluruh pihak:

1. Mahasiswa
Meningkatkan wawasan terkait bagaimana penerapan ilmu-ilmu perkuliahan di dunia kerja secara langsung, mendapatkan pengetahuan baru yang diperoleh di dunia kerja.
2. Akademik
Sebagai referensi untuk mahasiswa bila mereka akan menyusun laporan mengenai topik yang sama agar hasil analisis dapat dikembangkan lebih lanjut untuk tugas akhir yang akan datang.
3. Tempat Praktik Kerja Lapangan
 - a. Memberikan kontribusi kepada Kantor Konsultan Pajak Ronny Irawan dengan ikut berpartisipasi aktif dalam membantu kegiatan di kantor..

- b. Meringankan beban kerja Kantor Konsultan Pajak Ronny Irawan dengan menyelesaikan tugas-tugas di kantor.
4. Perusahaan (klien)
Menyediakan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk PT.X

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini mendeskripsikan alasan praktik dan laporan ini dilakukan yang mencakup latar belakang, ruang lingkup, tujuan laporan, manfaat laporan dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyediakan informasi dasar mengenai pengertian dan definisi yang dipakai di dalam tugas ini dimana sumbernya berasal dari undang-undang yang memiliki sangkut paut dengan laporan tugas akhir.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini menghadirkan deskripsi umum serta struktur organisasi Kantor Pajak Konsultan Ronny Irawan (*Jasper Consultant*) dan PT.X dimana di dalamnya juga terdapat deskripsi pelaksanaan kegiatan PKL.

BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas tentang perhitungan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Lapisan Penghasilan Kena Pajak, Perhitungan Gaji Karyawan PT.X jika menggunakan THR dan Bonus serta Perhitungan Gaji Karyawan PT.X jika tanpa menggunakan THR terdapat juga Laporan Realisasi Insentif Pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyajikan hasil simpulan serta saran berdasarkan hasil analisis data penulis, tentang Pengaruh Insentif Pajak Covid-19 Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perhitungan Konsultan Pajak.